

**REGULASI KONFLIK MASYARAKAT MULTIETNIK  
NAGARI SUNGAI BULUH BARAT,  
KECAMATAN BATANG ANAI,  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2018**

**REGULASI KONFLIK MASYARAKAT MULTIETNIK  
NAGARI SUNGAI BULUH BARAT,  
KECAMATAN BATANG ANAI,  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2018**

## ABSTRAK

**RILMA DEFI LESTARI 1410812019. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Regulasi Konflik Masyarakat Multietnik Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah halaman 114 lembar. Pembimbing I Zuldesni S.Sos, MA, Pembimbing II Dr. Elfitra, M.Si.**

Keberagaman yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia ke dalam kondisi konflik dan integrasi. Konflik sosial di Indonesia tidak seluruhnya berakhir dengan kekerasan. Kenyataan ini sebaiknya dibaca dari sudut pandang bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat sesungguhnya memiliki kemampuan untuk merespons berbagai keadaan dengan damai. Penelitian ini memperlihatkan kelompok masyarakat yang berbeda secara etnik dan agama memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan dengan regulasi konflik. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan bentuk pengaturan konflik sehubungan dengan masyarakat multietnik dan mendeskripsikan implementasi dari aturan yang ada, baik dalam hal adat dan agama.

Untuk melihat masalah ini, peneliti menggunakan teori regulasi konflik Ralf Dahrendorf yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya konflik. Aturan-aturan yang dimaksud yaitu berupa aturan formal yang tertulis, maupun aturan yang tersirat. Kajian regulasi konflik dalam masyarakat plural secara etnik merupakan upaya penyelesaian konflik yang tepat, memadai, dan komprehensif agar konflik tidak mengarah menjadi konflik yang massif, eskalatif dan destruktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengambilan dan pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* (disengaja). Analisis data yang digunakan adalah analisis data versi Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etnik Minangkabau dan etnik Nias telah mampu melakukan regulasi konflik di Nagari Sungai Buluh Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan diakomodirnya kepentingan etnik Nias dalam beberapa kesepakatan seperti pemberian gelar adat Minangkabau pada etnik Nias sebagai bentuk penerimaan etnik Nias di Sungai Buluh, kepemilikan tanah oleh masyarakat etnik Nias, pendirian dan perluasan bangunan gereja dan berternak babi. Disamping itu, tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat juga menjalankan fungsi regulasi konflik seperti isu kerukunan menjadi isu paling ditekankan dalam setiap khotbah, baik di masjid maupun gereja. Mereka juga menjadi tempat warga menyampaikan keluhan, keberatan dan persoalan hubungan antaretnik. Terakhir, KAN menjadi lembaga tertinggi etnik Minangkabau dan etnik Nias untuk menegosiasikan pertentangan kepentingan.

Kata Kunci: Regulasi Konflik, Masyarakat Multietnik, Pertentangan Kepentingan.

## ABSTRACT

**RILMA DEFI LESTARI 1410812019. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Andalas University, Padang. Title : Conflict Regulation of Multiethnic Society in Nagari Sungai Buluh Barat at Subdistrict Batang Anai, District Padang Pariaman. Number of Pages 114 sheets. Supervisor I Zuldesni, S.Sos, MA, Supervisor II Dr. Elfitra, M.Si.**

Diversity of Indonesia makes it into a state of conflict or integration. Social conflict in Indonesia are not entirely ended in violence. The fact should be read from the point of view that Indonesia society or group of society actually have the capacity to respond to the situation through peaceful meand. This study show of different ethnic and religion society in Nagari Sungai Buluh Barat who has the capacity to undertake conflict prevention efforts with conflict regulation. Therefore, the issue raised is how the conflict regulation of ethnic diversity in Nagari Sungai Buluh Barat society. While the goal to be achieved in this research is to describe rule of the game of society with ethnic diversity and describe rule of the game implementation in tradition and religion.

For this case, researcher use conflict regulation theory of Ralf Dahrendorf. Dahrendorf said conflict regulation is could affect the high and low escalation of the conlict. The rules can be formal written or implied rules. The study of conflict regulation in ethnic and religion plural societies is an attempt to resolve conflict with appropriate, adequate and comprehensive. This study used a qualitative approach with descriptive type. To obtain the data and information which are relevant with the purpose of the study conducted interviews and observation. Retrieval and selection of informants conducted by purposive sampling. The data analysis used in this study is the data analysis Miles and Huberman version.

The results show that Minangkabau ethnic and Nias ethnic to undartake conflict regulation in Nagari Sungai Buluh Barat. This was evidenced by the accommodation of Nias ethnic interests in several agreements such as the awarding of the Minangkabau customary title to the Nias ethnic as a form of ethnic acceptance of Nias in Sungai Buluh, land ownership by Nias ethnic people, establishment and expansion of church buildings and raising pigs. In addition, community leaders such as religious leaders and traditional leaders also carry out the functions of conflict regulation such as the issue of harmony being the most emphasized issue in every sermon, both in mosques and churches. They also bec ome a place for societies to submit complaints, objections and issues of inter-ethnic relations. Last, KAN Sungai Buluh became the highest institution for ethnic Minangkabau and ethnic Nias in negotiating conflicts of interest.

Keywords : Conflict Regulation, Multiethnic Societies, Conflict of Interest.